

BUKU PUTIH PERJUANGAN MAHASISWA 1978



DICETAK TERBATAS



DM
ITB



KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DEWAN MAHASISWA

Sekretariat : Jl. Ganesha 10 Bandung. Telp. 82051 Pesawat 39 J

No. :

Lamp. :

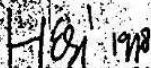
Hal :

KETENTUAN UNTUK BUKU PUTIH

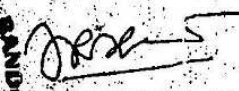
No 02]/EX-SEK/DM-ITB/1978

1. Setiap buku putih yang dikeluarkan oleh DM-ITB harus dicap/sepengetahuan DM ITB.
2. Setiap edisi yang terbit diberi kode edisi.
3. Pencetak ulangan/perbanyakan oleh pihak lain, selain DM ITB harus memenuhi persyaratan :
 - a. Atas persetujuan DM ITB secara tertulis dan didalam buku yang diperbanyak dimuat jumlah dan distribusinya.
 - b. Tidak diperkenankan merubah isi buku putih dan jika terdapat perbedaan isi dari "buku acuan" yang dipegang oleh DM ITB, maka DM ITB berhak menggagalkannya.
 - c. Pada buku tersebut harus tertulis pihak yang memperbanyaknya.
 - d. Setiap buku harus dilegalisir oleh DM ITB.

Bandung, 16 Januari 1978


Heri Achmadi
Ketua Umum




Yetti Rosila Nadi
Sekretaris Umum



KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DEWAN MAHASISWA

Sekretariat Jl. Ganesha 10 Bandung Telp. 82051 Pesawat 390

No. : 032/IN-SEK/PM-ITB/78

Bandung, 17 Januari 1978

Lamp. : -

Mel : Tanggapan

Kepada

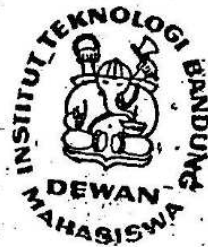
Yth. Alumni ITB, Ilmiah dan
Pembaca buku putih.

Salam sejahtera,

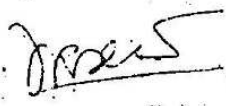
1. Dengan surat ini kami mengharapkan tanggapan, baik tanggapan ilmiah pada bagian yang saudara kuasai atau tanggapan yang bersifat menyeluruh untuk buku putih ini.
2. Segala tanggapan tersebut kita harapkan bisa menjadi tambahan untuk memperkuat, menambah data atau menganalisa untuk mencari kebenaran dan alternatif penyelesaian.
3. Segala tanggapan tersebut dapat dikirimkan atau disampaikan ke alamat :

DEWAN MAHASISWA ITB
JL. GANESHA 10
BANDUNG

4. Untuk segala perhatian Saudara kami menyampaikan terima kasih.

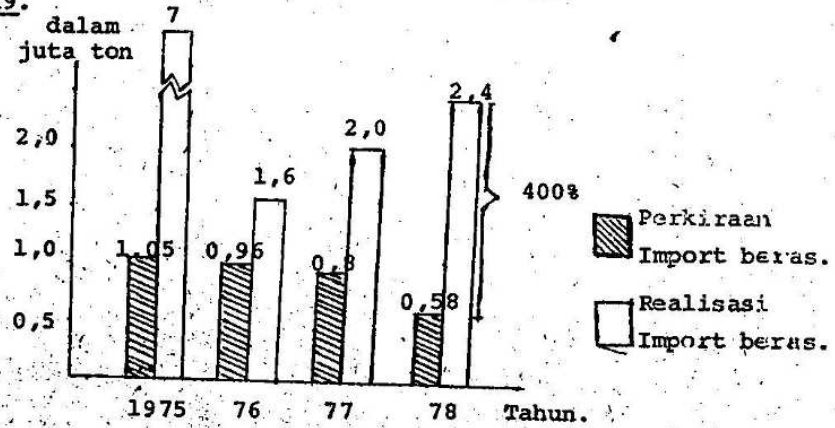


Dewan Mahasiswa ITB

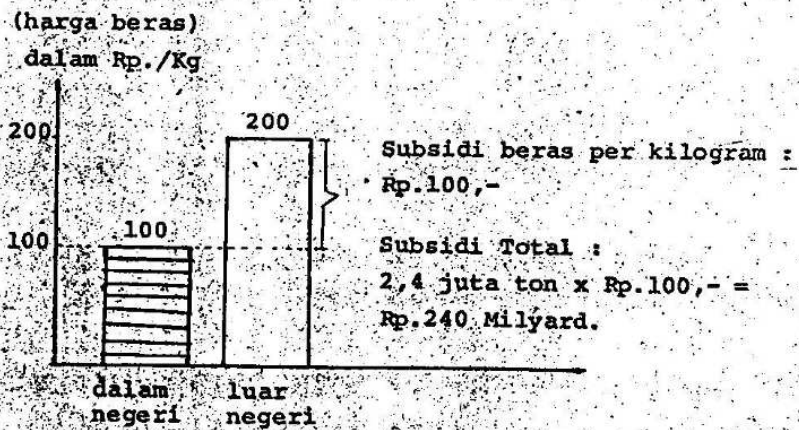

Yetti Rosila Hadi

Wk. Sekretaris Umum I

Halaman 19.



Halaman 20.



Halaman	Baris	Tertulis	Seharusnya
24	24	Binas/Inmas	Bimas/Inmas
	25	kampun	lampu
25	9	besarnya yang yang	besarnya uang yang
	15	Di mana dunia	Di mata dunia
26	28	pinjamab	pinjaman
	32	dari 1/2	dari 1
	32	beo asarkan	berdasarkan
27	13	pertamabahan	pertambahan
28	5	perl kami	perlu kami
	21	suara	suasana
30	22	isubsidi	disubsidi
	37	yangx ntung	yang untung
32	3	Badab Perancang	Badan Perancang
	46	se angkan	sedangkan
33	32	sem-kin	semakin
34	24	memanfaat-	memanfaat
	31	salam	salah
35	4	menenx kan	menentukan
	25	positif maupun	positif baik untuk pbb- ibu pribadi maupun

PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- I.1. Bahwa kehidupan Rakyat Indonesia hingga saat ini masih jauh dari cita-cita kemerdekaan yang menjadi landasan berdirinya Negara Republik Indonesia.
- I.2. Keadaan ini disebabkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang tidak tepat yang sebenarnya dapat diroboh jika pemerintah mempunyai iktikad politik untuk memperbaikinya. Keadaan tersebut juga disebabkan oleh adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dari para pejabat pemerintah, yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya kewibawaan Lembaga-Lembaga Pemerintah.
- I.3. Bahwa hal itu menunjukkan kegagalan pimpinan nasional dalam menjalankan fungsinya, dan adalah merupakan tanggung jawabnya.
- II.1. Bahwa kehidupan demokrasi harus dilaksanakan dengan memberi kesempatan seluas mungkin kepada kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat untuk turut menentukan pimpinan nasional.
- II.2. Bahwa dinamika politik di negeri ini tidak dimungkinkan tumbuh bila jabatan presiden dijabat lebih dari dua kali berturut-turut.

Maka dengan ini mahasiswa ITB menyatakan sikap :

TIDAK MEMPERCAYAI DAN TIDAK MENGINGINKAN SUHARTO, KEMBALI SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

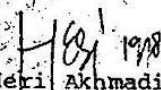
Dan menuntut :

1. Fraksi-fraksi dalam MPR segera menampilkan tokoh-tokoh Nasional yang berprestasi dan tidak diragukan integritasnya sebagai calon Presiden Republik Indonesia.
2. Agar MPR merealisasikan tuntutan mahasiswa yang tercantum dalam Ikrar Mahasiswa Indonesia 28 Oktober 1977.
3. Agar ABRI benar-benar berdiri di atas semua golongan demi kepentingan bangsa dan negara.

Hasil musyawarah Himpunan Mahasiswa - DM ITB

Tanggal 14 Januari 1978.

ATAS NAMA KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


Heri Akhmadi

KETUA UMUM DM ITB

KATA PENGANTAR

Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978 ini disusun oleh Team Penulis, terdiri dari beberapa mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang ditunjuk oleh Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdasarkan Surat Mandat DM ITB No 4; 017/MDT/DM ITB/1978.

Seluruh isi buku ini merupakan hasil perumusan dari diskusi-diskusi / pembicaraan-pembicaraan, serta pengumpulan dan penyusunan data-data yang dilakukan oleh team tersebut secara sendiri maupun bersama-sama dengan mahasiswa ITB lainnya.

Data-data yang dipakai dalam buku ini berasal dari Surat kabar-surat kabar, Majalah, Buku-buku yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti : "Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 74 / 75 - 78 / 79", serta bahan-bahan bacaan lainnya.

Akhirnya terima kasih kami tujukan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa ITB, bapak-bapak karyawan ITB yang telah membantu pembuatan buku ini, baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk-bentuk bantuan lainnya.

Semoga buku ini dapat berarti banyak untuk kita semua.

M e r d e k a !!!!!

Bandung, 16 Januari 1978

Dewan Mahasiswa I T B

I. PENDAHULUAN

Merdeka !!!!!!!

Sudah saatnya bagi kita semua untuk menggariskan perjuangan mahasiswa di tengah-ketidak beresan jalannya Pembangunan negara kita yang tercinta ini.

Kiranya tidak terlalu berlebihan kalau kita nyatakan bahwa semua ini merupakan - manifestasi dari rasa tanggung jawab kita sebagai generasi muda yang akan mengi - si kemerdekaan.

Buku Perjuangan Mahasiswa diterbitkan oleh Dewan Mahasiswa ITB ini, dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada masyarakat luas: mengapa kita harus berjuang dan apa yang harus diperjuangkan ???

Dalam tempo dan ritme perjuangan yang semakin meningkat, kita perlu menyampaikan landasan berpijak tentang apa yang harus kita perjoangkan saat ini dan pada saat mendatang.

Masalah yang dihadapi negara kita terlalu berat untuk dipertaruhkan lebih jauh. Apalagi setelah terjadi kesalahan strategi pembangunan selama 10 tahun terakhir. Kita harus secepat mungkin memperbaikinya.

Buku Putih ini bukan hanya membahas tentang terjadinya kasus-kasus negatif aki - bat kesalahan-kesalahan pelaksanaan, tetapi yang lebih ditekankan adalah justru kebijaksanaan itulah yang salah. Sedang kasus-kasusnya sendiri hanyalah merupa - kan akibat kebijaksanaan yang salah tersebut.

Akhirnya melalui buku ini diharapkan dapat digambarkan dengan jelas persoalan - persoalan yang sedang kita hadapi bersama.

Dan kami ajak semua pembaca buku ini untuk berjuang bersama-sama.

II. KEADAAN NEGARA KITA DEWASA INI

Berbagai kepincangan yang terjadi saat ini selain disebabkan oleh faktor Kepemimpinan Nasional juga oleh "Sistem Pemerintahan" yang diciptakan olehnya. Mekanisme pengaturan negara yang salah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijaksanaan dan pelaksanaan-pelaksanaan yang salah dan tak terkontrol telah menyebabkan terjadinya keresahan-keresahan masyarakat. Kesalahan kepemimpinan dan sistem telah terjadi di semua bidang: Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum, dan bidang-bidang pembangunan lainnya. Semuanya itu menimbulkan rasa tertekan dan ketidakadilan dalam masyarakat.

A. Politik :

Sistem politik yang berjalan selama ini mengakibatkan terus berlangsungnya kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dengan tanpa adanya "koreksi-koreksi" yang berarti dari partai Politik dan Golkar yang secara administratif disebut sebagai kekuatan politik resmi.

Disamping itu suara hati nurani rakyat kecil yang hidupnya tertekan dan tertindas oleh kekuatan "elite", tidak pernah sampai ketelinga pemerintah. Dan pemerintah pun tidak pernah membukakan telungannya kepada "suara hati rakyat jelata" yang murni danulus itu. Dengan demikian, maka sistem kehidupan orang kota mengeksploitir orang desa, orang kaya menindas orang miskin, mobil pribadi menyisihkan bus kota ke jalur lambat, orang bodoh kaya mendepak orang-pintar miskin, pengusaha non-pribumi mematikan usaha pribumi dsb. berlanjut terus tanpa dapat dicegah lagi oleh kaum yang tertindas. Bahkan dikeluhkan di DPR pun sudah tidak lagi.

Suasana sekarang, semua "orang atas" mengarahkan mata dan telinganya juga ke atas. Mereka berlomba-lomba untuk menikmati kemewahan-kemewahannya yang memang "disediakan" secara bebas oleh sistem perekonomian liberal yang dipraktikkan oleh pemerintah! Kealasan yang sampai sedemikian jauh itu salah satu sebab utamanya adalah tidak berjalannya fungsi kontrol sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga Negara memang "di-stel" untuk tidak mengganggu jalannya pembangunan kekuasaan eksekutif. Demi stabilitas pembangunan ekonomi, maka seluruh sistem dan gerak Lembaga-lembaga Tinggi Negara "disesuaikan" dengan selera eksekutif. Marilah kita lihat satu persatu keganjilan-keganjilan yang terdapat dari Lembaga-lembaga Tinggi negara kita.

A.1. DPR:

DPR saat ini belum merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat dan lembaga kontrol yang efektif. DPR hanya menonton saja segala ketidak beresan ketidak beresan yang terjadi di kalangan eksekutif!

Banyak kasus besar yang memalukan bangsa dan negara dan menuntut peran-

an para wakil rakyat untuk mengatasinya, tetapi mereka tak berkutik sedikitpun. Kasus-kasus besar misalnya sinyalemen pers luar negeri tentang penyuapan dalam pembelian "Satelit Palapa" telah memalukan negara kita di mata luar negeri. Karena itu seharusnya DPR mampu mengusutnya untuk membuktikan benar-tidaknya tuduhan itu. Tetapi apakah yang dilakukan oleh DPR? Cukup dengan mengadakan dengar pendapat beberapa kali untuk "basa-basi" kemudian setelah itu menganggap persoalannya selesai. Padahal sementara itu Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penyelesaiannya sebagai berikut : pertama-tama Menteri Perhubungan Emil Salim mengumumkan bahwa ia membentuk "team pengusut".

Setelah berjalan beberapa waktu, maka Menteri Emil Salim mengumumkan bahwa ternyata tidak ada bukti-bukti bahwa dalam pembelian Satelit Palapa terdapat penyuapan. Inilah suatu lelucon yang besar! Dalam kasus Palapa itu Departemen Perhubungan adalah pihak yang dicurigai, atau yang dituduh terkena kasus penyuapan. Tetapi kemudian Departemen Perhubungan sendiri yang membentuk "team pengusut" dan akhirnya mereka sendiri juga yang menyatakan bahwa Departemen Perhubungan bersih dan tidak ada "Skandal Palapa", dengan tidak ada pembuktian pembuktian yang sah menurut hukum!

..... Dan sandiwara ini berlalu dihadapan wajah para wakil rakyat di DPR, tanpa suatu apapun.

Kasus-kasus besar lainnya masih banyak juga yang "bernasib sama". Bulog misalnya, bahwa Bulog adalah "tempat basah" kedua setelah Pertamina hampir semua orang tahu bahwa banyak pejabat-pejabat Bulog yang bergaya hidup mirip-mirip dengan Budiaji juga hampir semua orang tahu. Tetapi mengapa yang dibongkar manipulasinya hanya Dolog Kal-Tim saja? Dan mengapa Budiaji berusaha keras untuk menutupi kesalahan-kesalahan di atasnya? Mengapa dari 7,6 milyar rupiah yang di "hilangkan" Budiaji hanya 3 milyar rupiah yang diketahui penggunaannya?

Apakah pengadilan Budiaji itu hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa Pemerintah pernah mengadili seorang koruptor? Walaupun untuk ukuran Nasional Budiaji masih termasuk "kelas teri" dan orang daerah yang jauh dari pusat. Tetapi pemerintah dengan demikian dapat mengatakan kepada rakyatnya, bahwa ia telah memberantas korupsi. Tetapi ketika R.O. Tambunan berusaha membongkar korupsi sampai dengan Bulog Pusat mengalami kemacetan. Selain itu DPR '77 juga tidak melanjutkan usaha R.O. Tambunan itu!

..... Dan sandiwara ini pun berlalu di hadapan wajah para wakil rakyat di DPR tanpa suatu hambatan apapun.

Ratusan peristiwa besar lainnya seperti Pertamina, Tanker Rp. 200 milyar kredit BBD dan sebagainya, yang menuntut peranan dari para wakil rakyat di DPR - tersebut mengalami "nasib yang sama".

Karena itulah kita harus berpikir, apakah sebabnya DPR kita begitu melempem - dan tidak dapat dipercaya lagi sebagai wakil rakyat????.

Sebabnya ialah memang DPR telah diatur oleh kepemimpinan eksekutif Nasional untuk menjadi melempem begitu! Sejak penentuan daftar calon resmi untuk anggota DPR dari setiap Parpol / Golkar pada waktu Pemilu, orang-orangnya telah dipilih oleh Pemerintah. Orang-orang yang terlalu berani, berwatak, mempunyai pendirian yang teguh, dianggap berbahaya, maka dicoret dari daftar calon. Maka yang tinggal dalam daftar calon yang "direstui" oleh pemerintah adalah orang-orang yang bersifat lembek atau paling tidak, maksimal adalah moderat, bisa kekanan bisa ke kiri, tetapi tentu saja dengan mayoritas yang lembek. Setelah mereka terpilih dan masuk menjadi anggota DPR, pertama-tama disambut dengan berbagai fasilitas istimewa untuk lebih "menjinakkan" mereka. Alat "penjinakan" pertama adalah jas seharga Rp. 90.000,- kemudian disusul dengan fasilitas akomodasi, transport (minimal K.A. kelas satu, bukan kelas rakyat), uang sidang, cicilan kendaraan VW dan sebagainya, sehingga total jendral kalau dinilai dengan uang mencapai + Rp. 250.000,- perbulan. Dan selain itu waktunya pun tidak terikat penuh, sehingga masih memungkinkan mereka mencari penghasilan lain di luar dengan efektif! Dan ingat, sebagai perseorangan anggota DPR kualitas kerja mereka tidak pernah ada yang mengontrol. Apakah mereka sering membolos sidang atau rajin, aktif bicara atau tidak pernah bicara, tidak satu pun orang yang mempersoalkannya! Masyarakat hanya bisa menilai kualitas kerja DPR secara lembaga, bukan secara perseorangan anggota DPR, akibat sistem Pemilu proporsional, bukannya distrik.

Setelah secara perseorangan seleksi, "dijinakkan", maka secara sistem / lembaga DPR pun juga "dijinakkan". DPR telah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat menggunakan hak-haknya! Hak angket, hak interpelasi, hak menentu - kan budget tidak pernah dapat digunakan oleh DPR. Untuk menjalankan hak angket (penyelidikan suatu masalah), maka ada suatu aturan bahwa peraturan pelaksanaan harus diatur oleh Undang-undang tersendiri. Maka untuk supaya DPR tidak dapat menggunakannya, supaya DPR tidak rewel, supaya tidak cerewet, supaya tidak usil menyelidiki Pertamina, Bulog, Kredit BBD, Tapos, Mangadeg, kekayaan pejabat dsb., dibuatlah supaya Undang-undang pengaturan hak angket itu tidak ada.

Jadi DPR tidak pernah dapat menggunakan hak angket! Dan untuk membuat tidak adanya Undang-undang itu bagi Golkar yang mayoritas ditambah fraksi ABRI yang diangkat oleh Presiden bukanlah soal yang sukar.

Masihkah rakyat dapat mengharapkan DPR yang demikian itu?..... Dalam penyelenggaraan Pemilu misalnya Panitia Pelaksana Pemilu bukanlah dibentuk dan diket oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi oleh Pemerintah. Padahal Pemerintah dengan Golkar nya ikut menjadi peserta Pemilu. Tak dapat dielakkan lagi eks-

Ekses seperti wasit Amir Machmud ikut main, Jurah-lurah ikut main, camat-camat ikut main, semuanya demi mengejar kemenangan bagi Golkar. Rakyat kecil di desa-desa pun ditekan-tekan, didesak-desak bahkan dikejar-kejar, diancam untuk diculik terjadi, terutama di daerah-daerah rawan Jabar, Jateng, Jatim. Walaupun demikian Sdr. Presiden Soeharto telah menyatakan Jawa Barat sebagai daerah Pemilihan yang terbaik! sedang Jakarta yang waktu itu menyelenggarakan Pemilu dengan baik, tenang tanpa insiden tidak dinyatakan sebagai daerah pemilihan terbaik! Apakah karena Gubernurnya Letjen. Marinir Ali Sadikin?..... Ataukah karena yang menang PPP? Bukannya Golkar?.....

Sungguh-sungguh tidak mempunyai jiwa besar sama sekali

..... Dan sandiwara ini pun berlalu di depan wajah para wakil rakyat dengan - tanpa mengalami suatu hambatan.

Dapatkah rakyat kecil didesa yang ditekan-tekan, dikejar-kejar waktu pemilu - itu meminta pertolongan para wakil rakyat di DPR???..... Jawabnya adalah tidak! Pada waktu komisi II DPR yang menangani masalah eksekusi Pemilu mau bersidang untuk membicarakan Insiden-Insiden Pemilu, terus menerus gagal karena tidak ada quorum, disebabkan para anggota Komisi II dari Golkar tidak pernah hadir.....

Masihkah rakyat dapat mengharapkan DPR yang demikian itu?

Karena itu, rakyat tidaklah heran kalau selama masa kerja DPR 1971-5 tahun hanya mampu menjadi tukang ketok palu menyetujui 43 RUU yang disodorkan oleh pemerintah. DPR sendiri tidak mampu menyusun sendiri RUU satupun!

Lebih buruk daripada DPR-GR orde lama yang berhasil menyelesaikan 2 buah KUU. Sebagian orang mungkin masih menaruh harapan kepada DPR hasil Pemilu 1977. Tetapi hendaklah kita ingatkan DPR '77 dilahirkan dengan proses yang sama dengan DPR '71.

Tokoh-tokohnya sebagian besar masih tetap sama, dan semua tata caranya juga sama.

A.2. MPR :

MPR '77 adalah MPR yang tidak konstitusional! Menurut pasal 2 Bab I UUD '45 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya Lembaga kumpulan dari wakil-wakil rakyatlah yang mempunyai kedaulatan. Tetapi dalam MPR '77 61% diantaranya bukanlah wakil rakyat! Mereka diangkat. Pemilu yang diadakan dengan susah payah, dengan biaya Rp. 60 milyar, rakyatpun pukul-memukul sampai berdarah, hanya memilih 31% dari anggota MPR. Jadi seandainya dalam suatu sidang umum MPR '77 39% anggota dipilih Pemilu berhalangan hadir dan yang hadir hanya 61% yang diangkat maka sahlah sidang itu.

Jadi apa bedanya dengan sidang umum MPRS?

Tidak ada bedanya, MPRS, MPR '71, MPR '77 semuanya adalah in konstitusional. Karena itulah peranannya sebagai pembawa aspirasi rakyat juga sangat diragukan. Banyak keganjilan keganjilan dibuatnya. Ketua MPR dirangkap oleh Ketua DPR, pertanggung jawaban Presiden bukan kepada MPR yang memilihnya, menyusun GBHN hanya melakukan editing terhadap konsep pemerintah dsbnya.

Ketua MPR dirangkap oleh Ketua DPR mengakibatkan kedudukan ketua MPR sejajar dengan Presiden. Presiden bertanggung jawab bukan kepada MPR yang mengangkatnya adalah lelucon yang lebih lucu daripada Srimulat. Pertanggung jawaban Presiden artinya, Presiden mempertanggungjawabkan segala macam kebijaksanaan dan kemampuan eksekutifnya dalam melaksanakan Garis Garis Besar Haluan Negara. GBHN tsb. yang membuatnya adalah MPR yang mengangkatnya. Yang mengikuti proses pelaksanaan GBHN dari hari ke hari juga MPR yang mengangkatnya, karena memang berada dalam masa kerjanya. Karena itulah MPR yang mengangkatnya lebih menghayati persoalan - nya, sampai di mana Presiden melaksanakan dengan baik, sampai di mana menyimpang dsb. Tetapi tiba-tiba terjadi lelucon seperti diatas.

Dan puncak kelucuannya adalah yang memutuskan polemik apakah Presiden harus bertanggung jawab ke MPR '71 atau '77 adalah Sdr. Presiden Soeharto sendiri, ketika berkunjung ke Kuala Lumpur dan berpidato di depan masyarakat Indonesia di sana. Seharusnya yang konstitusional

adalah MPR '71 sendiri yang memutuskan apakah Sdr. Presiden Soeharto harus bertanggung jawab kepada MPR '71 atau '77.

Dalam penyusunan GBHN 1978-1983, dagelan yang dibuat oleh MPR '77 bukan saja lebih lucu dari Srimulat, tetapi bahkan lebih lucu dari Charlie Chaplin! Badan pekerja MPR '77 yang sekarang sedang menggodog GBHN, sebenarnya hanya mengedit ulang Konsep GBHN yang dibuat oleh Wanhankamnas Team II. Sedangkan mengapa tiba-tiba langsung yang dibicarakan adalah konsep GBHN-nya sendiri tidak mempunyai alasan yang jelas. Adakah GBHN yang lama sudah di-evaluasi?

Mengapa BP MPR terburu-buru menyusun konsep GBHN yang baru? Kalau memang GBHN yang lama sudah bagus mengapa perlu membuat lagi yang baru? Apa memang perlu kita membuat yang baru? Apa memang kesalahan keadaan sekarang ini terletak pada GBHN-nya yang salah?

Sebenarnya pertama sekali yang harus dikerjakan oleh BP MPR '77 adalah evaluasi GBHN yang lama. Dan ini bukanlah pekerjaan gampang! Evaluasi GBHN haruslah menyangkut keseluruhan, sehingga jelas hubungan antara konsep GBHN dengan kebijaksanaan dan pelaksanaannya sekaligus. Karena kalau kita tidak menghubungkannya dengan pelaksanaannya, bagaimana kita bisa tahu GBHN lama baik atau buruk, salah atau benar? Inilah yang pertama-tama harus dikerjakan dulu oleh BP MPR '77, baru lah kemudian diputuskan perlu membuat GBHN baru atau tidak. Kalau memang perlu barulah disusun. Bukan sebaliknya.

A.3. Badan Pemeriksa Keuangan:

Ketua BPK seharusnya diangkat oleh MPR. BPK adalah badan yang memeriksa keuangan Pemerintah. Jadi adalah janggal apabila yang mengangkat ketuanya adalah Pemerintah.

Setelah diangkat disuruh memeriksa.

Menurut kebiasaan umum, alternatifnya ada dua, yaitu :

1. Yang diangkat adalah temannya sendiri
2. Apabila nanti ternyata memeriksanya terlalu keras, maka akan dicopot.

Mungkin tidak sejelek itu kejadiannya. Tetapi untuk menghindari semuanya itu, maka ketua BPK harus diangkat oleh MPR. Lalu pula BPK harus memberitahukan program program dan pelaksanaannya kepada DPR.

A.4. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah Badan Yudikatif dalam sistem pemerintahan suatu negara. Karenanya tidak boleh terpengaruh sedikitpun oleh kekuasaan eksekutif! Tetapi di negeri kita ini nasib Ketua Mahkamah Agung berada di tangan Presiden. Jadinya terpaksa ikut-ikutan mengamankan jalannya pemerintahan !!

Disamping kesalahan sistem politik terjadi di lembaga-lembaga Tinggi Negara, terdapat juga dalam sistem kehidupan partai politik dan Golkar.

A.5. Partai Politik dan Golongan Karya

Sebenarnya kekuatan politik resmi saat ini yaitu Papol dan Golkar bukanlah kekuatan politik yang nyata. Mereka memang secara administratif disebut sebagai golongan politik yang resmi. Tetapi kekuatan-kekuatan politik nyata adalah di tangan Pemerintah. Papol dan Golkar tidak mau terpaksa harus mengikut maunya pemerintah ini, kalau agak membandel langsung digunggu-gunggu sehingga bisa diatur sehingga tidak-tidaknya tidak sampai membahayakan pemerintah. Contoh yang paling jelas saat ini adalah "musibah" yang menimpa PDI. Karena mungkin dulunya PDI agak membandel kepada pemerintah, maka segera "di kupi" melalui Isaenindan Sunawar. Setelah itu nanti akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak begitu "membandel" lagi. Pemerintah telah melakukan politik praktis yang "amoral" !! Dan Sdr. Presiden Soeharto tidak menyalak terjadinya semua itu.

Selain itu Partai-partai tidak diperbolehkan masuk ke desa. Desa adalah tempat tinggal dari 80% penduduk Indonesia !!

Kalau partai-partai tidak masuk ke desa berarti penduduk Indonesia yang tertampung aspirasinya hanya 20%. Tetapi Papol dan Golkar selalu mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak berarti Manipulasi namanya. Dan karenanya maka banyak kasus-kasus yang terjadi di desa tidak tertampung di DPR. Sampai terjadi ke laparan di mana-mana tanpa ketahu orang-orang "atas" adalah disebabkan karena Papol dan Golkar tidak boleh masuk ke desa.

B. Ekonomi

Banyak kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi yang tidak menguntungkan rakyat banyak. Pemerintah hanya mengejar tingkat kenaikan GNP, tetapi menjadi lupa segala-galanya di luar target tersebut. Lupa prinsip keadilan, sosial, harga diri, budaya nasional dsb.

Penanaman modal asing 70% berada di "kota" Jakarta.

Yang 30% disebar di seluruh Indonesia. Di mana keadilan sosialnya? Siapakah yg tidak Panca Silais kalau begini? Mahasiswa atau pemerintah? Dan Sdr. Presiden Soeharto tidak menolak terjadinya kepincangan kebijaksanaan tersebut. Artinya-merestui.

Facilitas kredit dari pemerintah yang terbanyak, jatuh ke tangan non pribumi. Dan yang banyak melakukan manipulasi dengan kredit tersebut, juga orang-orang pribumi. Rp. 200 milyar kredit BBD yang hilang itu terbanyak juga dipakai oleh orang-orang non pribumi. Tetapi yang harus menanggung semuanya itu adalah rakyat.

Rakyat yang menanggung akibatnya, tetapi orang-orang non pribumi yang merasakan enaknya. Yang dapat menikmati hasil pembangunan yang terbesar adalah orang-orang non pribumi. Sebenarnya merekalah yang pendapatan per kapitanya naik berlipat-lipat. Bukan rakyat.

Sepuluh tahun yang lalu, Astra Group, Panin Group, Bank Central Asia, Liem - Soei Liong, dan cukong-cukong lainnya bukan apa-apa dibandingkan dengan sekarang. Tetapi rakyat Krawang tetap kelaparan. Dan pemerintah dengan bangganya selalu menjumlahkan pendapatan cukong-cukong itu dengan pendapatan rakyat Krawang, Boyolali, Gunung Kidul, kemudian membaginya sama rata. Kemudian dengan lantang pemerintah menyatakan: "pendapatan per capita telah naik pesat". Bukankah ini suatu manipulasi?? Rakyat Krawang yang sampai memakan eceng gondok itu telah menjadi korban manipulasi angka-angka yang selalu didewa-dewakan pemerintah. Rakyat Krawang telah menjadi korban angka statistik.

Dikatakan bahwa pendapatan perkapita tahun '67 adalah US \$ 80, dan tahun 1977 menjadi US \$ 130. Tetapi kenyataannya Krawang yang dari tahun ke tahun selalu menjadi gudang beras sehingga rakyatnya tidak pernah kelaparan, sekarang malah merosot menjadi kelaparan dan makan eceng gondok! Dan tahukah anda, apakah eceng gondok itu? eceng gondok itu adalah makanan babi.

Tetapi sementara itu memang pendapatan rakyat Glodok, Pintu kecil dan orang-orang non pribumi telah naik berlipat-lipat. Apakah memang pembangunan ini untuk mereka? Mereka yang pada waktu perang kemerdekaan tak mempunyai sumbangan apapun, sekarang mengambil manfaat pembangunan terbesar. Bagaimana itu?

Di lain pihak. Hutang-hutang pemerintah menumpuk. Dari IGGI US \$ 8 milyar, - Pertamina US \$ 10 milyar dan diluar bantuan-bantuan IGGI misalnya Satelit Palapa dsb masih banyak lagi.

C. SOSIAL BUDAYA :

Apakah kita masih mempunyai kebanggaan sebagai bangsa ??????

Apakah kita masih mempunyai rasa kebangsaan ??????

Ya, apakah semua itu masih ada?, jika secara resmi telah diakui bahwa : Kita masih belum menjadi "tuan di negeri sendiri"

Kita tidak bisa melarang pabrik-pabrik / industri asing yang beroperasi di tanah air kita, meskipun itu akan mengeluarkan asap pabrik yang membahayakan pernapasan, dan mengotori air sungai-sungai kita serta merusak kuping kita dengan suara-suara yang membisingkan.

Di daerah Garut, Jawa Barat sebuah industri asing membuat sumur bor yang mengakibatkan kekeringan sumur-sumur rakyat di sekelilingnya.

Demi kepentingan "pembangunan" pusat-pusat industri, hotel-hotel mewah, real estate dll., rakyat harus "merelakan" tempat tinggal, sawah (modal kernya) diratakan dengan tanah. Mereka tidak mampu mencegah, meskipun mereka adalah pemilik sah negeri ini !!!!!!!!

Yang lebih parah lagi, kita sekarang telah menjadi "pak tiru" yang baik.

Data, analisa kita telan mentah-mentah untuk dipakai dalam menentukan "kebijaksanaan pembangunan", walaupun itu dibuat oleh orang-orang asing yang tentunya mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri. Untuk menentukan jumlah manusia yang berada di bawah batas kemiskinan, kita memakai data dan analisa Bank Dunia. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dipakai angka-angka pertumbuhan GNP, GDP, Income percapita dan lain-lain cara pengukuran orang asing.

Saat ini telah bermunculan kelompok-kelompok yang menonjolkan kedaerahannya, bahasa Indonesia yang dipakai (dalam pidato resmi !!!) dicampur-adukkan dengan ejaan-ejaan daerah. Seakan-akan yang ada sekarang adalah daerah anu, suku anu dan bukan bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Cara berpikir dan gaya hidup yang dipakai sekarang seakan-akan membuat kita mundur beratur tahun yang lalu, ke jaman feodalisme. Yang dihargai bukan kerja tetapi kedudukan dan gengsi. Pejabat harus mempunyai mobil dan rumah lebih dari satu. Pakaian pelantikan anggota-anggota DPR (yang katanya wakil-wakil rakyat !!!) harus seharga Rp. 90.000,- isteri pembesar jika berbelanja harus ke Singapura atau Hongkong atau Paris. Makam keluarga harus dibuat semegah mungkin (tentunya juga semahal mungkin). Semua itu semata-mata hanya untuk gengsi.

Pembodohan besar-besaran sedang berlangsung saat ini. Rakyat dicekoki dengan istilah-istilah yang kabur atau sengaja dikaburkan. Untuk rakyat yang kelaparan dipergunakan istilah "kurang makan", "kemungkinan kurang makan", dan lain-lain. Terhadap kritik-kritik yang dilontarkan diberikan jawaban : "mengganggu stabilitas", "berindikasi ditunggangi" dll. Pejabat-pejabat, dari mulai kepala desa sampai pejabat-pejabat tertinggi sebagian telah menjadi pembesar administrasi dan bukan lagi pemimpin rakyat.

Solidaritas terhadap kemiskinan dan bencana yang menimpa saudara-saudara sebangsa, sudah tidak ada lagi !!!!

Sekelompok orang merayakan malam "old and new" dengan karcis seharga 35 ribu rupiah, sementara pada waktu yang sama, saudara-saudara sebangsa mereka terpaksa meng "eceng-gondok" di Krawang. Uang Rp. 35.000,- sama dengan upah untuk menggarap satu hektar sawah, untuk menghidupi keluarganya sepanjang tahun.

Sebagian pejabat (juga anak-anaknya) memiliki ratusan hektar tanah, sementara tanah milik petani makin lama makin menyusut. Tuan Sigit Soeharto tentunya dapat berbicara banyak tentang "ranch" beliau seluas 350 hektar di Tapos Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pukat-pukat harimau diizinkan beroperasi sewenang-wenang (karena "menguntungkan" tentunya), mendesak nelayan-nelayan dengan perahu tak bermotor. Nelayan nelayan di Cilacap, pantai Utara Jawa Tengah dan Sumatra Utara, Aceh, Riau, dan daerah-daerah pantai di Indonesia lainnya, tentunya dapat lebih banyak bercerita tentang masalah ini!

Keadilan sosial, solidaritas terhadap saudara-saudara sebangsa yang menderita, hanya tinggal dalam kata-kata dan tindakan-tindakan semu. Yang ada hanyalah pidato-pidato, kunjungan-kunjungan kerumah asuhan, "peninjauan" ke daerah bencana alam dengan publikasi besar-besaran untuk menunjukkan "kemurahan hati".

D. HUKUM :

Hukum yang sekarang berlaku di negeri ini adalah : "sanksi hukum untuk rakyat kebanyakan, perlindungan hukum untuk para pembesar". Tidak percaya ?????

Kita lihat kembali beberapa kasus : Apakah pertanggungjawaban Ibnu Sutowo dalam masalah Pertamina telah selesai? Bagaimana dengan uang negara sejumlah Rp. 4,6 milyar hasil korupsi Budiaji yang belum diketahui ke mana "hilangnya" Pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak pejabat (apapun alasannya adalah pembunuhan !) tidak diadili secara jujur, putera "yang terhormat" bapak Ali Murtopo akhirnya toh dibebaskan; Jendral Pol. Widodo malah menjadi Kepala Polri, setelah anaknya melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian. Apapun alasan yang dikemukakan, itu semua adalah peristiwa pembunuhan/pencabutan nyawa dengan memakai senjata terlarang. Sembilan belas orang penyelundup telah dibebaskan tanpa proses pengadilan dari Nusa Kambangan.

Sementara itu: berapa orang saat ini yang menjadi "tahanan sementara", tertungkatung sekian lama tanpa penyelesaian hukum ?????

Akan tetapi, hukum memang tidak dapat berlaku sepenuhnya saat ini, karena lembaga-lembaga hukum (sampai yang tertinggi pun) tidak berdiri bebas, menjalankan fungsinya dengan baik tanpa membedakan apakah yang dihadapinya pembesar pemerintah atau bukan !! Bagaimana Mahkamah Agung akan menjadi lembaga kehakiman tertinggi jika Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden ??????

III. PENYEBAB DARI KEADAAN NEGARA SAAT INI

Semua situasi nasional yang terjadi pada dewasa ini disebabkan oleh dua faktor utama, ialah :

1. Kepemimpinan Nasional
2. Strategi pembangunan

1. Pola kepemimpinan Nasional yang memusatkan seluruh kekuasaan ditangannya telah melumpuhkan kekuatan-kekuatan politik resmi yang konstitusional. Partai Politik dan Golkar tidak dapat membawakan suara hati rakyat, karena tidak mempunyai kekuatan nyata. Jadi penyampaian aspirasi lewat DPR juga suatu sandiwara. Pemusat an kekuatan politik ini adalah demi mengamankan kelanggengan kekuasaannya.

Selain itu gaya hidup dari keluarga Sdr. Presiden Soeharto memberikan pengaruh Sosial Budaya yang luas sekali kepada mayoritas rakyat kita. Pemberian fasilitas kepada anak-anak dan adik-asiknya telah ditiru oleh banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah dari segala tingkatan. Gubernur-gubernur, Bupati-bupati, lurah-lurah dsb. Keluarga Presiden Soeharto yang menjadi kaya raya setelah beberapa tahun menjadi Kepala Negara (a.l. Tapos, Mangadeg) telah memberikan perasaan kepada para pejabat yang lebih rendah, bahwa merekapun berhak untuk berlaku seperti Presiden mereka. Maka merekapun ramai-ramai mencontoh pemimpinnya. Jadi kekayaan Sdr. Presiden Soeharto telah mempunyai pengaruh besar terhadap berkembangnya budaya korupsi di Indonesia ! Padahal kalau kita melihat para pemimpin perjuangan kemerdekaan dulu : adakah Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir mempunyai "kekayaan berlimpah-limpah"?

Adakah Bung Karno yang bertahun-tahun "disekap" dalam penjara itu menuntut kekayaan an yang berlimpah-limpah untuk tebusan perjuangannya? Walaupun ia punya kesempatan untuk mengeruk kekayaan pada waktu ia menjadi Presiden yang sangat berkuasa, tetapi ia tidak melakukannya.

Bung Hatta, Bung Syahrir dan pemimpin-pemimpin sejati rakyat lainnya, walaupun telah bertahun-tahun disekap dalam penjara, diasingkan dan dikejar-kejar, tidak menuntut imbalan kekayaan yang berlimpah-limpah. Mereka itu "mencintai Indonesia", bukan mencintai dirinya sendiri. Kalau calon makam Presiden Soeharto dibangun dengan uang yang tak ternilai lagi jumlah, maka Bung Karno cukup kecil dan murah. Tetapi justru disitulah semakin meninggikan nilainya.

Karena itulah pribadi Soeharto semakin jauh dari identitas ABRI sejati. Semakin - tahun semakin tidak mengharumkan nama ABRI.

Faktor kedua yang mempengaruhi keadaan negara kita sekarang adalah "strategi pembangunan" kita.

Demi strategi pembangunan ekonomi, maka seluruh sistem pemerintahan, politik, budaya, sosial dikorbankan untuk mengamatkannya. DPR yang brengsek, MPR yang Inkon-

stitutionil seperti disebutkan di depan, memang dibuat oleh pemerintah untuk mengamankan strategi pembangunan. DPR memang dibuat melemah. Partai-partai lemah, BPK tidak jalan, Pola budaya tidak terkendali, semuanya adalah demi mendukung pengenaan target kenaikan GNP yang tinggi. Karena itulah bidang-bidang lain di luar kenaikan GNP 7%, merosot, menjadi lebih mundur dari Orla.

Rasa kebangsaan misalnya : kita jamin, seandainya sekarang, tancangkan semacam "Trikora" dulu, hanya segelintir pemuda saja yang akan mau menjadi sukarelawan! Ini berarti kemunduran yang parah. Dan soal-soal non ekonomi begini memang tidak dapat dinyatakan dengan angka-angka seperti GNP. Karena itu strategi pembangunan yang hanya berorientasi kenaikan GNP adalah kerdil. Jadi situasi negara kita yang rusak ini akibat dari strategi pembangunan yang kerdil itu !

IV. KARENA ITU, MAKA MAHASISWA BERJUANG

Melihat segala penderitaan "rakyat jelata" yang nasibnya tak berubah semenjak orde lama, malahan diantaranya makin buruk, mahasiswa tidak dapat tinggal diam. Petani yang dililit hutang-hutang Bimas, Buruh-buruh tani yang kehilangan pekerjaan akibat masuknya traktor-traktor Jepang dan huller Jepang, nelayan tradisional yang didesak oleh pukat harimau, ratusan desa yang kelaparan dan banjir, mencari lapangan kerja susah, pungutan liar dimana-mana, korupsi di setiap tempat, rumah rakyat kecil digusur-gusur untuk pembangunan proyek-proyek orang gedean, sementara itu para cukong makin jaya, para pejabat makin kaya, Presiden dan keluarganya makin kaya, orang-orang gedean dilindungi hukum, orang-orang kecil dikenakan hukum, semuanya itu membuat hati mahasiswa tak tertahankan lagi untuk tak berjuang. Lebih-lebih setelah terbukti Parpol, Golkar, DPR diam saja terhadap semua kenyataan-kenyataan itu. Mereka semua macet, mandul dan hanya boneka boneka politik saja.

Jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar, adalah bahaya yang besar. Hal itu mengundang tumbuhnya kembali komunisme di negeri kita! Sebenarnya secara tidak sadar kita telah terjebak dalam situasi yang diinginkan oleh orang-orang komunis, yaitu rakyat yang melarat makin melarat dan yang kaya makin kaya. Oleh karena itu keadaan ini harus diselamatkan! Kita tahu ancaman komunis begitu besarnya. Vietnam sudah mulai intervensi ke Kamboja. Angkatan perangnya mempunyai personel 700.000 orang, mempunyai 600 tank, lebih banyak dari tank yang dimiliki oleh gabungan seluruh negara Asean.

Jadi keadaan negara kita sekarang harus dirubah! Keadilan harus menggantikan kependudukan, Hukum harus ditegakkan untuk seluruh warganegara tanpa perbedaan, pola hidup konsumtif harus dibasmi, korupsi dibantas, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, dipercaya rakyat dan berwibawa.

Untuk itulah maka mahasiswa bergerak dan berjuang!

Dan karena seluruh keadaan itu harus dirubah secara drastis, maka sasaran perjuangannya ada 2 yaitu mengganti Soeharto melalui sidang umum MPR Maret '78 nanti dan mengganti strategi pembangunan Nasional.

Tetapi mahasiswa sama sekali tidak menghenjaki terjadinya anarkhi. Karena hal itu hanya akan mengorbankan rakyat kecil lagi yang tidak tahu apa-apa dan biasanya cenderung lebih emosional.

Setelah Sidang Umum MPR Maret nanti kita harus mempunyai Presiden dan pemerintah

yang baru yang mampu membasmi kekurangan-kekurangan yang ada sekarang.

Kami ingatkan, bahwa perjuangan mahasiswa adalah demi mewujudkan pemerintahan -
yang bersih, berlandaskan UUD '45 dan Panca Sila yang murni. I

Semoga Tuhan memberkati

D M - I T B

KALAU MELIHAT KENYATAAN MAKA STRATEGI PEMBANGUNAN HARUS DIRUBAH !

JUM'AT, 23 DESEMBER 1977

Strategi Pembangunan Nasional Perlu Dipikirkan Lagi

Yogyakarta, Kompas.
Prof. Ir. Soedarsono Hadi
asutro, Direktur LPM (Lem-
baga Pengembangan Masya-
rakat) Gajah Mada menyori-
kan perlunya dipikirkan lagi
strategi pembangunan natio-
nal. Evaluasi semacam itu sa-
ngat penting guna melihat

Bupati Boyolali

Bukan Busung
Lapar Tetapi
Kurang Gizi

Ketidakberesan pada "Tebu Rakyat Intensifikasi"

Yogya, Kompas
"Tamu Opatib Pusat berhasil

Dalam pengusutan semen- dapat okur

di Tegal

Solichin G.P. tentang Karawang

Kalau Tidak Diselamatkan

Puluhan Ribu Penduduk

akan Menderita HO

Jakarta, Kompas

Pertanian - perindustrian - perdagangan NTB :

Perkembangannya Masih Seret

* Jurang kaya-miskin makin lebar

MATARAM, Kompas

Berdasarkan harga konstan tahun 1973, Product Domestic
Regional daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut nilai
rill naik rata-rata 11,8%. Tapi bila ditinjau secara sektoral,
pendapatan rill percapita penduduk yang hidup dalam sektor
pertanian hanya naik rata-rata 7,3%. Sedangkan income per
capita penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian naik
rata-rata 10,5%.

Malam Tahun Baru, Malam Penjerukan Uang Besar-besaran

Jakarta, Kompas

* Ada Tempat Hiburan yang Mentargetkan Rp. 36 juta

Di Luar 5 Kecamatan Kab. Karawang

94 Kecamatan Jabar Mulai Rawan Pangan

Bandung, 12 Okt. (SH).

Di kota Bandung tahun 1977 :

Meningkat,

Perampokan dan Pembunuhan

* Masih banyak yang belum terungkap

BANDUNG, Kompas

Buntut Larangan Tebang Ulin dan Krulig
Giliran Wantilan di Kabupaten
Tanah Laut Dilarang Beroperasi
* 100.000 Penduduk Kehilangan Mata Pencariannya
Buntut dari penahanan truk-truk yang menaruh kayu
di kota Pesisir
saud pada dengan larangan
(pengangkutan kayu ulin)
Laut, Pesisir dan Krulig
Jat. Selasa 27 Desember 1

SEMENTARA RAKYAT KELAPARAN: BANK DUNIA MEMBERIKAN
Presiden Soeharto: DATA NYA KEPADA
PRESIDEN R-1 SBB:

Hanya 3 dari 10 Penduduk Indonesia
Berada di Bawah Garis Kemiskinan

Bupati Karawang mengenai Daerahnya:

Kekurangan Makan,
Bukan Kelaparan

Ibu Tien
berulang tahun

Ketahanan pangan di Kab.

Subang dan Purwakerta

tanah - perindustrian - perdagangan NTB

Perkembangannya Masih Seret

urang kaya-miskin makin lebar

Karawang
bonar
gawat

ABUS KARAWANG MENUJU KETUA FRAKSI KP

Masalahnya Soal Pemilikan Tanah
Yang Bertentangan Dengan Undang²

Prof Thyeb Pertiadja jelaskan:

Diimpor 8500 ton

Di Boyolali
Muncul Gejala²
Busung Lapar

minyak kelapa
dan 6000
ton kopra

Jeaji Golkar
Kunjungan kerja selama
satu hari dari fraksi KP ini
sebenarnya adalah untuk
melihat sejauh mana Jeaji
Golkar dalam kampanye ke-
pada masyarakat sebagai di-
Tangkaiak (Kabupaten Kar-
awang) sudah dapat ter-
penuhi.

Dalam kesempatan ter-

NENEK BILANG:
"DULU INDONESIA-
EKSPOR TIS KOPRA
TAPI LUKAT
SAK..."

Menurut Lektor FH. Untari:

Hanya Orang-orang Kaya
yang Dapat Nikmati Keadilan
Banjir di Indramayu dan Cirebon Lebih Besar daripada Tahun Lalu

Opstib Tetap Jamin Lindungi
Ny. Dj sebagai Pelapor

30 Ribu Penduduk Menderita

BEBERAPA INDIKATOR KEGAGALAN PEMERINTAH SUHARTO

"Banyak orang beranggapan bahwa ketimpangan² dan ketidak berhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Suharto, se-mata² hanya karena kesalahan para pelaksana. Pelaksana yang tidak hecus, korupsi dsb. Tetapi sebetulnya kesalahan terbesar tidak terletak pada faktor pelaksanaan, tetapi terletak pada strategi pembangunan dan kebijaksanaan pembangunan itu sendiri."

Paper berikut akan mencoba melakukan analisa terhadap strategi pembangunan, terutama yang menyangkut kebijaksanaan² pembangunan. Ternyata kemudian bahwa kebijaksanaan yang diambil telah menyimpang dari arah dan tujuan pembangunan yang sebenarnya. Dari serangkaian diskusi dan analisa yang dilakukan oleh para penulis paper ini, kami sampai pada suatu kesimpulan yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata konseptor² pembangunan kita sekarang (Bappenas + Departemen²) sebetulnya mengetahui dan menyadari ketimpangan² dan kesalahan kebijaksanaan pembangunan sekarang. Tetapi mengapa mereka diam ? Mengapa mereka bisu ? pada hal kesalahan² kebijaksanaan mereka membuat jutaan orang menderita ? Mungkin mereka diam, karena mereka adalah pelacur² intelektual yang tidak punya integritas ilmiah ! Atau mereka tergolong dalam kelompok² yang menikmati "hasil² pembangunan" karena kesalahan² kebijaksanaan mereka ??.

Sebelum kami melanjutkan uraian kami, untuk mereka yang secara sadar atau tidak sadar termasuk dalam sekelompok kecil orang² yang ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan di negeri ini, kami ingatkan :

"Hati nurani orang miskin adalah bersih; namun mereka merasa malu..... Mereka merasa tak tampak oleh orang lain, menggapai-gapai di kegelapan. Umat manusia tak pernah memperhatikannya. Mereka berkeliaran dan berkelana tak teracuhkan..... Di tengah-tengah keramaian, ditempat ibadat, dipasar..... Mereka berada dalam kegelapan seolah didalam selokan atau gudang bawah tanah. Mereka tidak ditegur, se-olah² tiada. Menjadi sama sekali tidak terlihat, dan mengetahui hal ini,... .. adalah tak tertahankan."

JOHN ADAMS.

sejak beberapa tahun yang lalu, Indonesia mulai melaksanakan pembangunan yang berencana. Hakikat suatu perencanaan adalah kebijaksanaan yang didasari oleh "kemauan politik" pemerintah yang berkuasa. Kalau pemerintah yang sedang berkuasa tidak punya itikad yang tulus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak, maka perencanaan yang dibuat hanyalah suatu rencana yang paspasan yang sedemikian rupa sehingga dalam jangka pendek suasana tetap stabil dan rakyat tidak berontak. Tetapi perencanaan yang seperti ini akan melupakan keuntungan jangka panjang, hanya untuk kepentingan jangka pendek, demi kelanjutan rezim yang berkuasa.

Kasus2 menunjukkan bahwa persoalan2 yang timbul akibat salah kebijaksanaan pemerintah selalu ditimpakan kesalahannya pada pelaksanaan atau pada alam (suatu cara berpikir yang sangat primitif!!).

Contoh sederhana : Yang Mulia Menteri Pertanian Prof. Dr. Thoyib Hadiwijaya menyatakan bahwa kegagalan kenaikan produksi beras adalah karena kesalahan alam terganggu oleh musim dan serangan hama. Produksi dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan karena konsumsi beras per-kapita dsb.dsb. Tetapi apakah pernah ditinjau bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam strategis dan kebijaksanaan pertanian? Yang nota bene adalah kesalahan Yang Mulia Sdr. Thoyib Hadiwijaya dan Sdr. Widjojo yang di Bappennas. Untuk memudahkan kita meninjau kebijaksanaan2 pemerintah yang salah, kami harapkan pembaca melihat terlebih dahulu definisi "kebijaksanaan" pada lampiran paper ini.

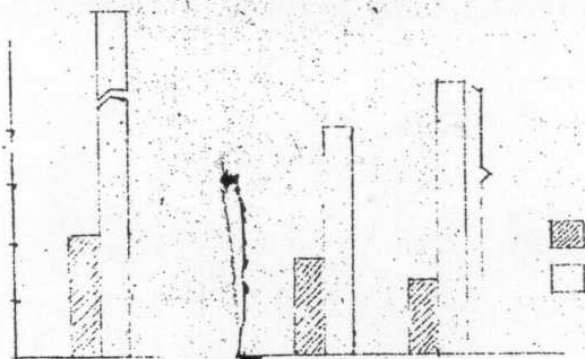
PERTANIAN

Dalam Pelita I dan II, serta Repelita III digembar-gembor-kan bahwa titik berat pembangunan ekonomi adalah dalam bidang Per-tanian (sesuai dengan Tritura dan GBHN). Sesuai dengan amanat tersebut maka strategi pembangunan pertanian harus ditujukan pada:

- a). Pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam bidang pangan.
- b). Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat banyak.
- c). Sumber devisa negara.

Tetapi coba kita lihat sekarang apa yang terjadi setelah dua Pelita dalam bidang Pertanian :

Perkiraan import beras (dalam juta ton)	Tahun	Realisasi import beras (dalam juta ton)
1,05	1975	7
0,96	1976	1,6
0,80	1977	2,0
0,58	1978	2,4



Kalau kita lihat untuk tahun 1978 ternyata realisasi import 400 % melebihi perkiraan import. Wah...Wah... opo tumon Sdr. Thoyib Hadi-wijaya ???

Siapapun yang pernah masuk perguruan tinggi tentu mengerti bahwa kesalahan dilapangan hanya boleh maksimum 20 %. Nah sekarang bagai-mana dengan kesalahan saudara Thoyib dan tuan tuen di Repelinas yang 400 % ?? Untuk membodohi rakyat, Sdr. Thoyib dan Kabulog

Bustanul Arifin beserta Wijoyo mengatakan bahwa kenaikan import beras karena musim dan serangan hama, serta kenaikan jumlah penduduk. Sekarang coba kita bantah keterangan-keterangan beliau tsb : Nah untuk mengatasi kesalahan perkiraan dan kebijaksanaan mereka, pemerintah membeli beras dengan jalan melakukan import dari Korea-Selatan, Jepang, Amerika, Australia dan Philipina dengan perbandingan harga sbb. :

(harga beras)
dalam Rp./Kg



Subsidi beras per kilogram :

Rp. 100,-

Subsidi Total :

2,4 juta ton x Rp 100,- =

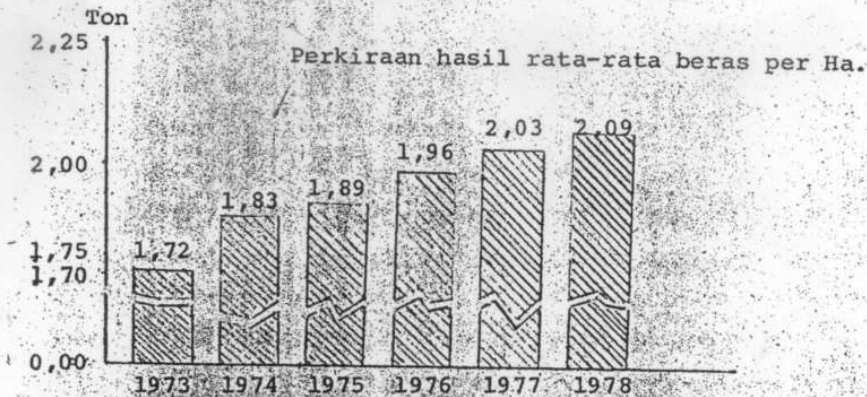
Rp. 240 milyar.

Pembaca tentu melihat bahwa harga beras import tsb. ternyata Rp. 100/kg. lebih mahal dari harga beras dalam negeri. Ini artinya pemerintah Indonesia memberi makan (subsidi) sebanyak Rp. 100,-/kg kepada petani dari negara2 Korea Selatan, Jepang, Australia dsb. Wah Tuan2 Thoyib Hadiwijaya, Bustanul Arifin dan tuan2 di Bappennas kok malah membantu meningkatkan produksi pertanian negara2 lain, apa nggak salah ?? Kecipratan komisi apa ?? Sudah nggak mampu meningkatkan produksi dalam negeri, eh..... malahan bantu meningkatkan produksi pertanian orang lain. Kualat nanti mas !!!

Jumlah subsidi yang diberikan pemerintah untuk import beras selama tahun 1978 adalah 2,4 juta ton (x Rp 100,-/kg = Rp. 240 milyar.) Coba kita bandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan kepada petani dalam bentuk Bimas selama tahun 1974, hanya Rp. 44 milyar, thus lebih kecil dari jumlah subsidi yang dikeluarkan untuk import beras dari luar negeri. Dan pembaca tahu apa tindakan alat2 pemerintah kepada petani2 yang tidak mampu melunasi kredit Bimas mereka ? Pejabat KORAMIL (Komando Rayon Militer) setempat menahan kompas, sepeda dan alat2 rumah tangga petani sebagai jaminan agar petani melunasi kredit Bimas mereka. Apa nggak sadis ?? apalagi jika dibandingkan dengan jumlah uang yang diberikan kepada petani2 luar negeri - (Rp. 240 milyar).

Sekarang mari kita analisa kebijaksanaan2 Pemerintah (perencana : Bappennas, pelaksana : Menteri Pertanian) dalam bidang pertanian; Dalam usaha memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, Pemerintah melaksanakan program Intensifikasi Pertanian (Bimas dan Inmas) yang merupakan program utama Pemerintah dalam usaha peningkatan produksi beras.

Kalau kita lihat grafik di bawah ini :



Maka terlihat bahwa usaha intensifikasi pertanian hanya mampu meningkatkan produksi beras maximum 2.09 ton/Ha. Artinya intensifikasi pertanian mempunyai suatu batas (limit) produksi tertentu. Seandainya persawahan di Indonesia telah sepenuhnya terintensifikasi (dengan produksi maksimum 2.09 ton/Ha) Apakah kebutuhan beras dalam negeri akan terpenuhi ?? Kami yakin tidak !!!

Terutama untuk memenuhi kebutuhan pada masa datang. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa program intensifikasi pertanian mustahil akan mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dalam jangka panjang. Tetapi kok.... aneh, Pemerintah masih berkeras untuk melaksanakan program intensifikasi ??????

Ada beberapa kemungkinan kenapa Pemerintah bersikeras untuk melaksanakan program2 semacam Bimas dan Inmas tsb. :

- i) Program-program Bimas dan Inmas adalah program-program dengan menggunakan teknologi dan peralatan yang baru bagi petani. Dapatkah pembaca menghitung berapa keperluan pupuk, insektisida, alat pertanian modern, yang diperlukan untuk membimaskan seluruh areal persawahan di Indonesia. Ini mah..... obyeknya milyaran eui..... saha nu untung??? tentu saja kaum kapitalis dan modal asing, beserta antek-anteknya di Indonesia.
- ii) Dengan program-program seperti Bimas dan Inmas, maka cukup banyak aparat-aparat pelaksana yang akan kecipratan "hasil-

hasil pembangunan" dalam bentuk komisi dan insentif per-
areal persawahan.

- Dari segi yang lain, pembangunan pertanian dimaksudkan se-
bagai usaha untuk menampung tenaga kerja. Tetapi ini merupakan sua-
tu kegagalan pada siang bolong, karena luas pemilikan tanah rata-rata
petani adalah kecil sekali (0,16 hektar perkepala keluarga).
• Dengan luas pemilikan seperti ini mana mungkin intensifikasi perta-
nian akan mampu menyerap 80 % dari pertambahan angkatan kerja per-
kotaan (1,2 juta) yang berada di daerah pedesaan.

Seandainya pemerintah (Menteri Pertanian dan Bappenas) jika meny-
adari bahwa program-program intensifikasi tidak akan mampu memenuhi
kebutuhan beras dalam negeri harus telah mulai melaksanakan usaha-
usaha ekstensifikasi (perluasan areal) pertanian secara nasional -
dan meluas. Karena ekstensifikasi pertanian dalam jangka panjang a-
kan menjawab kebutuhan beras dalam negeri serta menyerap tenaga ker-
ja dan penyebaran aktifitas ekonomi di seluruh tanah air. Bukan ha-
nya di Jawa. Mau Tahu..... apa yang telah dilakukan Sdr.Thoyib Ha-
jiwi Jayadalam bidang ekstensifikasi pertanian.....
nampak nihil !!!!!

- Sekarang mari kita teliti konsep stabilitas harga dalam hubungannya
dengan pendapatan para petani. Seperti diketahui trilogi pembangun-
an yang selama ini didengung-dengungkan yaitu : pertumbuhan ekonomi,
• perataan hasil pembangunan dan stabilitas, merupakan dasar kebijak-
sanaan Pemerintah. Akan tetapi kebijaksanaan ini telah merugikan rak-
yat banyak. Penentuan "harga beras" untuk ke 9 bahan pokok, adalah
suatu kebijaksanaan untuk yang mendasarkan diri pada konsep stabili-
tas. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan harga 9 bahan pokok.....?
yang notabene adalah rakyat petani, orang desa. Mereka hanya boleh
menjual hasil produksi mereka sampai suatu batas harga tertentu ,
mereka tidak akan bisa menjual dengan harga lebih tinggi dari harga
batas.

Mereka menghadapi suatu barrier harga tertentu. Tetapi seandainya -
penduduk desa penghasil ke 9 bahan pokok ingin membeli barang-barang
• modal / alat produksi yang berasal dari kota, maka mereka harus mem-
beli barang dengan "harga pasar" yang berlaku di kota-kota besar.
• Tidak ada harga batas, yang berlaku bagi barang-barang yang dijual
di kota-kota. Harga barang mengikuti prinsip "ekonomi liberal" har-
ga barang bergantung pada demand / kebutuhan.

Di sini kita melihat suatu kepincangan yang mendasar, kepincangan

yang timbul sebagai akibat dari salahnya kebijaksanaan Pemerintah. Rakyat desa produsen ke 9 bahan pokok semestinya menikmati keuntungan pola hubungan ekonomi desa dan kota ; karena mereka adalah kelompok masyarakat yang harus dilindungi, karena mereka adalah mayoritas bangsa Indonesia. Tetapi apakah yang terjadi ? Akibat kebijaksanaan yang didasari prinsip stabilitas, maka mayoritas rakyat penduduk desa, justru paling dirugikan. Ini semua demi stabilitas. Apalagi kalau kita memperhitungkan ongkos angkut. Ben-cana !!! Yang diterima oleh rakyat desa adalah harga batas dikurangi ongkos-ongkos angkutan. Sedang yang harus mereka beli adalah harga pasar ditambah ongkos angkut.

Bagaimana dengan undang-undang landreform, apakah telah dilaksanakan ??? Ternyata undang-undang yang melindungi para petani ini hanya baru berupa undang-undang kertas, alias tidak pernah dilaksanakan. Bahkan lebih gawat lagi, muncul tuan-tuan tanah baru yang merupakan barisan pejabat-pejabat Indonesia dan kelompok pemilik uang (tolong tanya sama saudara Sigit Suharto berapa hektar tanah yang dimilikinya). Perbaikan pengairan, bendungan yang dilakukan pemerintah sering bahkan mengusir petani di sekitar bendungan dari sawah miliknya semula, karena terdesak oleh pemilik modal. Kaum berduit melepas uangnya untuk membeli sekian ribu hektar tanah. Ini sudah menjadi semacam simbol status sosial. Pergilah ke-desa2, maka dengan lancar orang desa akan mengatakan bahwa tanah itu miliknya Jendral Anu, yang diseberang sungai itu milik Bapak Badu. Ini fakta. Bendungan-bendungan juga dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik. Tetapi apa yang terjadi ?? Di Jatiluhur, dibawah jaringan transmisi dan distribusi, berdiam sekian ribu rakyat Indonesia yang belum kebagian listrik. Yang beginikah pembangunan untuk rakyat banyak ??????????.....

II. KEUANGAN

Pemerintah sering mendengung-dengungkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada pengusaha kecil dan lemah. Usaha-usaha Pemerintah tersebut dicerminkan dalam pemberian kredit KIK, KMKP, dan Canda Kulak, tetapi seberapa besar persentase kredit yang diberikan kepada pengusaha lemah ini dibandingkan dengan jumlah total kredit yang disalurkan sampai sekarang masih merupakan tanda tanya besar. Sepertimasing seperseratus atau lebih kecil lagi ??? Sebetulnya perbandingan ini dapat dipakai sebagai ukuran seberapa besar sebetulnya kesadaran Nasionalisme dari Soeharto dkk.

Kalau kita perhatikan kepada siapa ratusan milyar kredit diberikan??? Maka jawabnya gampang ditebak, yaitu kepada kelompok pengusaha-pengusaha non pribumi. Seandainya kasus kemacetan kredit-kredit di Bank Bumi Daya (Rp. 200.000 milyar) dan di bank-bank pemerintah yang lain dijelaskan di depan pengadilan, maka akan terlihat bahwa kemacetan-kemacetan tersebut disebabkan oleh kerjasama yang erat antara beberapa pejabat dan pengusaha-pengusaha non pribumi serta pengusaha yang mempunyai hubungan dengan pejabat melalui katabeleceunya. Dari kasus-kasus tersebut di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa, secara sadar maupun tidak sadar regime Soeharto telah memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pengusaha-pengusaha non pribumi untuk menguasai tata perekonomian di Indonesia. Dari sini pembaca dapat menentukan sendiri berapa besar kadar Nasionalisme regime Soeharto.

Dan sampai sekarang kita belum pernah mendengar tindakan yang tegas kepada para oknum yang terlibat kasus kemacetan kredit tersebut. Coba bandingkan dengan tindakan-tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai pemerintah kepada para petani yang mengikuti program Binas/Inmas. Mereka dipaksa menaminkan kompornya, kampun petromaksnya dan sepedanya untuk nilai tunggakan yang hanya beberapa puluh atau ratus ribu.

Sistem perpajakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah belum sepenuhnya mengikuti sistem perpajakan progresif: artinya orang yang lebih kaya harus dibebani persentase pajak yang lebih besar daripada orang yang kurang mampu. Contohnya: Bioskop-bioskop yang kebanyakan dimiliki oleh pengusaha non pribumi, sering memasang tarif sampai 35.000 rupiah per orang. Apakah besar pajak yang harus dibayar pengusaha bioskop kepada pemerintah sama dengan bioskop yang memasang karcis hanya 400 rupiah??? Pada kasus ini, Pemerintah belum sepenuhnya mengikuti prinsip pajak progresif.

Salah satu kebijaksanaan pembiayaan pembangunan dan routine negara adalah dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung memperlihatkan sumbangan yang lebih besar 2,5 kali pajak tidak langsung.

Pada kenyataannya orang-orang/badan hukum yang terkena pajak mempunyai dua pembukuan. Kepada Bank diperlihatkan keuntungan yang besar sebagai jaminan bonafiditas, sedangkan kepada Inspeksi pajak, diperlihatkan keuntungan yang kecil sekali, guna merendahkan pajak. Dan tidak perlu ditutup-tutupi bahwa pada zaman ini berlaku negosiasi penetapan besarnya pajak.

Seorang petugas pajak akan lebih dulu menetapkan besarnya pajak yang tinggi. Misalnya yang ditentukan bagi Pak Probosutejo adalah :

Rp. 10.000.000,- Dengan negosiasi dimaksud di atas, disepakati besarnya yang harus dibayarkan adalah (cukup) Rp. 4.000.000,- saja.

Tidak berarti berhenti sampai di situ saja.

Dari Rp. 4.000.000,- tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- disetorkan ke Inspeksi Pajak sedangkan Rp. 2.000.000,- sisanya adalah ongkos negosiasi yang selanjutnya dipersembahkan bagi pribadi sebagai bagian formal dari inspeksi pajak.

Di mana dunia Indonesia termasuk golongan negara berkembang (sumbuhan sektor pertanian lebih besar daripada sektor industri). Untuk ini, dalam membiayai pembangunannya, ditentukan kebijaksanaan pinjaman luar negeri. Sementara tidak semua orang mengetahui jumlah uang yang telah dipinjam, kita kenal istilah "pinjaman komitmen pemerintah". Angka-angka pinjaman yang seperti ini dapat dengan mudah ditemukan. Tetapi masih ada bentuk-bentuk pinjaman lain seperti: untuk pembangunan di SD Palapa dan lain-lain yang non komitmen. Angka pasti sulit ditemukan, atau malah disangkal. Ada juga yang disebut : "Bantuan Proyek". Nilainya sampai sekian milyar US \$; Tetapi perhitungannya jauh di atas harga pasaran dan sering tanpa suku cadang.

Dua faktor penting yang sangat mempengaruhi tata perekonomian Nasional adalah laju inflasi serta kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Pemerintah baru-baru ini menyatakan bahwa laju inflasi untuk tahun 1977 adalah 11,82%. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa nilai beli uang rupiah ternyata menurun jauh lebih besar daripada angka laju inflasi tsb. Ini menunjukkan bahwa laju inflasi dinyatakan oleh pemerintah lebih kecil daripada laju inflasi sebenarnya.

Contoh: Begitu OPSTIB dilepaskan, yang menyebabkan kenaikan ongkos angkut (karena jumlah barang yang diangkut kendaraan disesuaikan dengan tonasi kendaraan sehingga tidak dapat melakukan angkutan melebihi kapasitas resmi kendaraan). Bagaimana keadaan harga barang ? ? ? ? ?

Ternyata semuanya naik.

Mungkin kenaikan angka OPSTIB lebih tepat untuk mengukur laju inflasi.

III. BIDANG TRANSMIGRASI & KOPERASI INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam PELITA III, industri diharapkan sebagai salah satu bidang penyerap tenaga kerja. Ada ketentuan-ketentuan mengenai penanaman Modal Asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Tetapi apakah kenyataannya ???

Selama 8 tahun terakhir ini kebijaksanaan dalam bidang industri hanya mampu menyerak 1,2 juta tenaga kerja. Berarti hanya 12.5 % yang tersalurkan. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan dalam bidang industri yang sekarang dilaksanakan tidak akan mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Belum lagi kalau harus diperhitungkan berhentinya sejumlah usaha Nasional akibat masuknya modal asing. Susu Indo Milk misalnya modal/bahan baku yang berasal dari negeri ini hanya air saja. "Induk susu" nya masih didatangkan dari Australia. Lapangan kerja tidak bertambah pengaruh sampingannya malah merusak kehidupan bangsa.

Kebijaksanaan industri seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah adalah pengembangan industri pendukung pertanian, karena pertanian merupakan lapangan kerja bagi 60% rakyat Indonesia. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertumbuhan industri konsumtif, bukan penunjang pertanian, yang berkembang dengan sangat cepat sekali; contohnya: sepeda motor, mobil, dsb.

Dalam segi pengembangan wilayah, rencana pembangunan suatu daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok kota besar dan asing. Semua pihak sebenarnya menyadari bahwa daerah-daerah di luar pulau Jawa perlu dikembangkan untuk menjawab masalah produksi pangan, lapangan kerja, kelestarian lingkungan dsb. Kasus di bawah ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia (Bappenas) belum mempunyai strategi pembangunan/pengembangan wilayah yang sesuai untuk daerah di luar Jawa. Karenanya mereka nuntut kriteria yang ditentukan negara asing.

Contoh kasus: masuknya pinjaman luar negeri memaksa dipakainya ketentuan-ketentuan dari negara pemberi pinjaman. Apa saja namanya baik itu Bank Dunia, IGGI, ADB, atau yang lain. Mereka meminjamkan uangnya kalau secara kuantitatif proyek tersebut feasible. Maka muncullah bermacam-macam feasibility study. Ditentukan nilai cost benefit ratio harus lebih besar dari 1/2. Dengan rate of return berdasarkan ketentuan Bank Dunia. Benefit yang diproyeksikan dalam nilai uang ada dua macam:

Pertama direct benefit, dan kedua indirect benefit, yang abstrak sifatnya. Faktor yang mempengaruhi diantaranya tingkat perkembangan daerah tersebut. Maka sering ditemui bahwa pembangunan di luar Jawa Benefit-Cost Rationya lebih kecil dari 1. Apakah feasibility study MERUPAKAN SATU SATUNYA UKURAN DAPAT TIDAKNYA pembangunan suatu proyek??

Begitulah adanya untuk melayani selera pemberi pinjaman.

Diakui atau tidak kita berhadapan dengan apa yang disebut indeks regional. Biaya pembebasan untuk proyek Jagorawi mencapai Rp. 2 milyar lebih. Sementara - hampir 2/3-nya untuk membebaskan tanah di wilayah DKI. Untuk memperbaiki "ring - road" di kota Jakarta diperlukan biaya per kilometer sebesar 3 milyar. Berapa anggaran belanja Aceh, atau Sumatera Selatan atau Kalimantan Tengah ?????????? Kebijakan-kebijaksanaan Pemerintah dalam transmigrasi, yaitu usaha pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau luar Jawa, hanya ditangani secara sektoral dan parsial. Artinya kebijakan mengenai transmigrasi belum mempunyai kaitan yang jelas dengan usaha-usaha untuk mendistribusikan aktifitas ekonomi dan kesejahteraan yang merata ke seluruh tanah air.

Kemampuan Pemerintah untuk mentransmigrasikan penduduk ke luar Jawa maksimum hanya 100.000 kepala keluarga setahun (rencana th. 78). Ini berarti perpindahan kira-kira 0,5 juta penduduk per tahun. Padahal pertambahan penduduk pulau Jawa akibat kelahiran adalah kira-kira 2 juta orang pertahun. Data tersebut menunjukkan bahwa usaha transmigrasi yang ditangani secara sektoral dan parsial tidak akan mampu menyelesaikan masalah kependudukan. Selama sebagian besar aktifitas ekonomi, sosial, budaya masih terpusat di pulau Jawa maka arus urbanisasi tidak akan bisa dikurangi. Dan selama itu pula kebijakan transmigrasi gagal total.

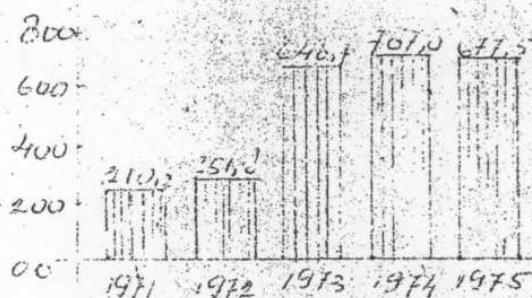
Pengembangan wilayah di luar pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan baru (pusat aktifitas ekonomi, sosial dan budaya), akan membantu pemindahan penduduk secara alamiah, dan tidak perlu dengan transmigrasi

IV. PERDAGANGAN

Untuk yang terhormat tuan Radius Prawiro, kami mau tanya, sama saudara Radius, apakah fungsi dari Departemen Perdagangan hanya sebagai perantara "jual - beli" dan untuk memperkenalkan pola hidup mewah pada rakyat Indonesia ??? Agak-nya Saudara Radius perikami ingatkan pada angka-angka dan grafik sbb :

Tahun	Import barang konsumtif (dalam 1.000.000 US \$)
1971	210,2
1972	251,8
1973	648,7
1974	707,0
1975	677,5

Grafik peningkatan import barang konsumtif :



Saudara Radius toh dapat melihat bahwa import barang konsumtif Indonesia terus meningkat. Nah, di sini kami mau mempertanyakan apakah saudara telah betul-betul menyadari tujuan pembangunan Indonesia seperti digariskan oleh GBHN dan UUD 45. Dengan meningkatnya import barang-barang konsumtif ini maka artinya saudara Radius membantu menurunkan rasa kebanggaan dan kepercayaan diri bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok kecil masyarakat Indonesia akan mendemonstrasikan "kebolehan barang import" tersebut, pada rakyat banyak, sehingga mereka turut ketagihan barang-barang import. Nah bagaimana konsep pembangunan manusia Indonesia secukupnya???? Hal ini mungkin karena saudara Radius terbiasa dengan cara berpikir cost-benefit (keuntungan harga) bukan keuntungan nilai (value benefit). Demi rakyat banyak dan kepentingan masa depan Indonesia ????

Setelah melihat kasus di atas, apakah saudara Radius mengakui bahwa kebijaksanaan saudara dalam bidang perdagangan tidak membantu menciptakan suasana dan bimbingan yang mengarah ke pola kreatif dan produktif demi kepentingan bangsa ini dalam

Jangka panjang ?????

Disamping itu perlu kami beritahukan kepada saudara Radius tentang masuk-nyabarang-barang luar negeri bukan melalui prosedur resmi, alias penyelundupan. Saudara juga harus menerima toh, sebagai menteri perdagangan, agar supaya benda-benda eks selundupan tersebut tidak beredar di pasaran bebas. Karena ini artinya peningkatan volume import secara semu. Sehingga data yang disebutkan di atas jadi lebih besar.

Selain itu kami sebagai bangsa Indonesia pribumi, mayoritas negeri ini, tentu menginginkan agar kebijaksanaan yang saudara ambil menguntungkan penduduk pribumi, bukan malah menguntungkan penduduk non pribumi. Kami sangat berharap kalau saudara Radius dapat mengungkapkan berapa persen dari aktifitas dan volume perdagangan yang dilola oleh penduduk pribumi Indonesia. Dan berapa besar usaha saudara untuk meningkatkan persentase tersebut??? Kalau usaha saudara tidak berarti, wah nanti bisa kuwalat mas Radfur.

V. PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

Menterinya Sdr. Sutami yang juga mempunyai sederetan gelar ilmiah. Dia Prof. Dr. Ir. dan Haji. Sdr. Sutami sering bicara bahwa pembangunan bidang perumahan, air minum, gas, tata kota, jalan raya, pengairan, pengembangan sumber-sumber air dan listrik, adalah untuk rakyat kecil.

Apa ini sudah betul????? Rakyat kecil yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia belum mampu menikmati, hasil pembangunan, yang mencakup bidang-bidang yang dimaksud oleh saudara Sutami di atas.

Bidang listrik, dewasa ini telah tersedia sekian Mega watt tenaga listrik. Sehingga Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya tidak akan menderita gelap lampu lagi seperti pada tahun 1972 yang lalu. Tetapi jangan lupa

Di bawah jaringan transmisi dan distribusi dari Jatiluhur menuju Jakarta atau Jawa Barat terdapat sebagian besar bangsa Indonesia yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikmati listrik. Mereka hanya dilewati oleh kabel-kabel yang sampai mati mereka tidak mengerti artinya.

Orang kota????? Setiap rumah mempunyai kulkas, televisi, rice cooker, mesin jahit listrik, dan sebagainya. Jadi orang-orang inilah yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan tenaga listrik yang harganya berjuta dollar AS. Biayanya berasal dari pinjaman Luar Negeri. Dan harus dibayar oleh rakyat banyak. Bagaimana dengan Sutami ????. Masih atas nama Rakyatkah apa-apa yang saudara laksanakan. Coba pikir kembali baik-baik. Listrik di tolak oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang katanya setiap tahun masih merugi dan berarti masih harus subsidi Pemerintah. Yah bagaimana lagi. Uang rakyat terpaksa dipakai untuk mensubsidi. Sebaiknya saudara Sutami menarik pernyataannya yang meng "atas nama rakyat"

Pengairan, tadi telah disinggung bahwa memanfaatkan adanya daerah persawahan adalah lagi-lagi orang beruang banyak. Petani yang semula merupakan pemilik tanah pertanian di sekitar daerah yang akan dibangun irigasinya terpaksa menyingkir untuk selama-lamanya dan kemudian menjadi buruh tani bagi tuan tanah baru yang banyak uangnya. Betul.... Di atas kertas apa yang dibangun oleh Departemen PUTL adalah untuk rakyat banyak. Tetapi kenyataan pahitlah yang sebenarnya harus diterima rakyat banyak. Sementara ini jalan raya yang dibangun, juga tidak bisa dinikmati rakyat banyak sepenuhnya. Mungkin diperkirakan bahwa dibangunnya jalan raya berarti akan memudahkan petani dalam menjual hasil tanamannya ke kota-kota. Namun..... terimalah pula "pil pahit" ini. Nyatanya, orang kota, yang mempunyai simpanan yang banyaklah yang menikmati manfaat jalan raya ini.

Mereka akan dengan mudah "turun" ke desa-desa untuk membeli hasil tanaman orang desa dengan harga murah. Nah orang besar lagi yang untung.

Demikian pula dengan air minum. Orang kecil cukup memakai air kali atau sungai. Orang kotalah yang memanfaatkan sumber air dari desa bagi kesejahteraan hidupnya.

Akhirnya hampir semua yang dibangun, kebanyakan hanya memberi manfaat dan dapat dirasakan oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Ini sekaligus menyanggah pernyataan Sdr. Sutami yang menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Departemennya itu untuk rakyat banyak.

Bagaimana pula dengan gairah membangun luar Jawa? Masih jauh dari apa yang diharapkan. Untuk menyelematkan daerah aliran sungai Bengawan Solo, PUTL menghitung keperluan biaya sebesar Rp. 200 milyar. Untuk jalan yang diberi nama Jagorawi? Dan lainnya lagi. Apakah tanah Indonesia hanya pulau Jawa, sementara luar Jawa dilerantarkan. Memang sebagian besar rakyat berdiam di Pulau Jawa. Tetapi makin tinggi tingkat pelayanan serta tingkat ketersediaan barang di Pulau Jawa itu akan makin merugikan kebijaksanaan Pemerintah sendiri. Karena akan terjadi pemusatan penduduk dan keperluan hidupnya.

Departemen Sdr. Sutami memiliki anggaran terbesar dan sewajarnya pula bila dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak.

Di negara tercinta ini terdapat badan yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan departemen-departemen yang bernama Badan Perancang Pembangunan Nasional. Di sini diputuskan sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta prioritas pembangunan tanah air. Prosedur pengesahan anggaran ditentukan harus melalui apa yang disebut Daftar Usulan Proyek (DUP) dan setelah disetujui oleh Bappenas dikeluarkan ketetapan berupa Daftar Isian Proyek (DIP) yang sekaligus berisikan ketentuan anggaran. Sebelumnya masih bertele-tele lagi dengan harus dibuat Daftar Usulan Kegiatan. Kalau ada film "King of King" maka dapat disebut bahwa Bappenas adalah raja dari departemen-departemen. Pemerintah, atau katakan saja super departemen. Dewasa ini ketuanya merangkap Menteri Negara EKUIN, saudara Prof. Dr. Wijoyo Nitissastro. Kalau dalam pewayangan ada istilah dalang, maka dalam pembangunan Indonesia Wijoyo inilah dalangnya. Dari peranan yang dilakukannya, terlihat dengan jelas bahwa sang dalang pembangunan Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab atas strategi operasional pembangunan Indonesia. Artinya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan dalam pembangunan Indonesia semestinya terutama ditimpakan pada orang-orang yang merencanakan dan memberi kerangka pembangunan Indonesia. Tentu saja dalam perencanaan pembangunan Indonesia, tuan Wijoyo lebih mendengarkan bisikan-bisikan sahabat-sahabat karibnya, meener-meener dari Harvard dan Berkeley yang tentunya saja punya interest dalam pembangunan Indonesia. Salah satu kasus yang menarik dalam cerita yang diislapkan sang dalang adalah masalah "pinjaman luar negeri" :

Di mata dunia, Indonesia digolongkan sebagai negara yang berkembang (sumbangan sektor pertanian lebih besar dari sumbangan sektor industri). Untuk ini, dalam membiayai pembangunannya, ditentukan kebijaksanaan "pinjaman luar negeri." Sementara tidak semua orang dapat mengetahui jumlah uang yang telah dipinjam, kita kenal istilah pinjaman "komitment pemerintah". Angka-angka pinjaman yang seperti ini dapat dengan mudah kita temukan, tetapi masih ada bentuk-bentuk pinjaman lain seperti untuk biaya "SKSD Palapa" dan lain-lain yang non komitmen. Angka-angka ini pasti sulit ditemukan; atau sengaja di simpan. Ada juga yang disebut "bantuan proyek". Nilainya sampai sekian milyar US \$; tetapi yang diberikan barang-barang yang harganya di atas harga pasaran dan tanpa buku cadang.

Dalam menentukan masih mungkin atau tidaknya, kita meminjam uang dari luar, tuan Wijoyo dan kawan-kawan menentukan bahwa, bila $X \leq 20\% Y$ BISA

di mana, X = angsuran hutang luar negeri/tahun.

Y = devisa negara (export).

Dengan sangat mudah semua orang bisa mengartikan angka-angka di atas. Maka dengan mudah pula kita dapat mengatakan bahwa kebijaksanaan ini salah. Bukankah nilai X , secara Matematika yang paling dasar, adalah "fixed" sedangkan Y adalah

"variable". Bagaimana kalau harga kayu sebagai salah satu sumber devisa negara merosot dalam perdagangan dunia. Bagaimana kalau suatu saat, sumbangan sektor minyak bumi yang dominan bagi devisa negara itu merosot? Sdr. Sadli yang menteri Pertambangan mengatakan :

"Dalam tahun ini, sumbangan export non minyak mencapai US \$ 3,5 milyar dan export minyak US \$ 6,0 milyar. Memang selama export minyak itu besar, sudah barang tentu akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi keadaan ini tidak dapat bertahan terus menerus, karena untuk 10, 20 atau 30 tahun mendatang export minyak pasti akan merurun.

Menurunnya export minyak ini didasarkan pada hasil penelitian ahli-ahli teknis. Sebab jumlah eksploitasi dan penemuan dalam 2 tahun ini kurang dapat mengimbangnya."

Inikah kebijaksanaan peminjaman uang jangka panjang yang masih betul ??

Realisasi pinjaman luar negeri dalam bentuk komitmen sejak tahun 1969 mencapai US \$ 4,9 milyar (termasuk perkiraan realisasi 1976/1977). Contoh non komitmen dan sempat memberi "kejutan" adalah hutang PERTAMINA sebesar \$ 10 milyar. Siapa yang harus menanggung salahnya kebijaksanaan ini? Rakyat banyak. Padahal mereka tidak diberitahu besarnya pinjaman-pinjaman non komitmen tsb. Dalam mengukur keberhasilan dan kebijaksanaan yang diambil, tuan Wijoyo serta kawan-kawannya mengukurnya dengan beberapa angka, seperti pertumbuhan GNP, GDP, besarnya income per capita dan tingkat laju inflasi serta lain-lainnya lagi. Dengan angka-angka itulah para Penganbil Kebijakan mengatakan bahwa 3 orang dari 10 orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Ini suatu kemajuan yang menakjubkan. Ada juga standard yang mengatakan bahwa bila income-percapita di atas US \$ 75,- berarti sudah berada di atas garis kemiskinan.

Seorang gelandangan, pemungut rokok di kota-kota besar, yang sehari-hari mendapatkan makan dari tong sampah rumah makan, tidur di kolong jembatan atau emper toko, berpakaian seadanya; Setiap harinya mendapat uang sebesar Rp. 300,-. Maka sebulannya ia menerima Rp. 9.000,- dan setahunnya Rp. 108.000,- atau US \$ 250,- Sudah berada di atas garis kemiskinan.

Inikah ukuran keberhasilan suatu kebijaksanaan? Kalau begitu, semakin banyak gelandangan, maka akan semakin makmur negara ini. Hidup pak Wijoyo !!!!!